



MEETING MINUTES

14/02/2019

09:00-13:00 WIB

Hotel Ayana Midplaza - Jakarta

Rapat diselenggarakan oleh:	INOBU & EFI
Jenis Rapat:	Pertemuan langsung
Moderator:	Bernadinus Steni
Pencatat:	INOBU
Participants:	Annex 1

Pertemuan Komite Penasihat Terpercaya Ketiga diadakan di Hotel Ayana Midplaza yang dihadiri oleh 30 peserta. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk:

- Diskusi dan identifikasi indikator utama untuk keberlanjutan yurisdiksi (dengan fokus di tingkat kabupaten);
- Menerima saran dari anggota Komite Penasihat untuk melanjutkan proses;
- Mendiskusikan apakah kementerian dapat memberikan data untuk indikator;
- Menentukan apakah LSM dapat menguji indikator di kabupaten mereka dan menilai ketersediaan data.

Ringkasan Diskusi

Sambutan oleh Delegasi Uni Eropa (Michael Bucki)

- Setelah memberikan sambutan kepada peserta, Michael Bucki menyampaikan beberapa informasi terbaru mengenai rancangan peraturan UE tentang penentuan risiko penggunaan bahan baku dari perubahan tata guna lahan tidak langsung (indirect land use change - ILUC). Risiko itu dapat dipilah menjadi risiko yang tinggi dan risiko yang rendah. Terhadap risiko yang rendah diperlukan sertifikasi untuk penggunaan biofuel dari ILUC yang rendah. Draft peraturan itu terbuka untuk konsultasi hingga 8 Maret.
- Rancangan Peraturan menetapkan tiga kriteria untuk risiko rendah, yang akan diterapkan pada produksi kelapa sawit, yang meliputi:
 - Produksi oleh pekebun kecil,
 - Penggunaan lahan yang tidak digunakan secara langsung untuk biofuel, termasuk tanah terlantar atau rusak parah,
 - Biofuel diproduksi sebagai hasil dari peningkatan produktivitas.
- Rancangan peraturan akan segera ditetapkan dan mulai berlaku pada tahun 2021. Sementara, aturan pelaksanaan akan dikeluarkan sebagai skema penilaian untuk bukti keberlanjutan sesuai dengan kriteria ILUC.
- Studi Terpercaya juga menjadi penting dalam konteks itu, dengan cara memberikan informasi tentang serangkaian kriteria untuk minyak sawit berisiko rendah, serta tentang kriteria dan indikator lain yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan Indonesia.
- Michael Bucki mengingatkan bahwa perlu menemukan cara untuk membuktikan, melalui informasi yang berkualitas, bahwa produksi telah beralih ke arah berkelanjutan untuk penerimaan pasar yang lebih baik.



Kemajuan studi Terpercaya (Jeremy Boardhead - EFi)



- Jeremy mengingatkan bahwa studi ini difokuskan pada indikator keberlanjutan di tingkat kabupaten dilengkapi dengan studi penting lain yang dipimpin oleh inisiatif Trase, khusus pada pelacakan rantai pasokan minyak sawit (untuk koneksi pasar).
- Komponen Trase melihat rantai pasokan minyak sawit dan informasi tentang perdagangan minyak sawit dari pelabuhan ke negara-negara pengimpor. Trase bekerja untuk melacak dari pelabuhan dan kembali ke kabupaten dan tidak akan melacak ke tingkat petani.



- Pendekatan yurisdiksi Terpercaya mengidentifikasi 19 indikator, yang diperoleh dari serangkaian diskusi dari pertemuan Komite Penasihat sebelumnya dan juga melalui berbagai konsultasi. Indikatornya masih dalam bentuk konsep, yang mencakup berbagai aspek keberlanjutan, seperti aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan pemerintahan.

- Idanya adalah agar setiap kabupaten menunjukkan kemajuan menuju keberlanjutan, untuk menjadi dasar menggerakkan peluang insentif ke tingkat kabupaten, sehingga pasar dapat membeli dari kabupaten dan memberikan insentif kepada kabupaten yang berkelanjutan.
- Pendekatan ini didasarkan pada kerangka hukum, untuk setiap indikator.
- Halaman web untuk penelitian ini, dengan semua dokumen terbaru, dapat ditemukan pada: <http://www.euredd.efi.int/publication/tracking-sustainable-palm-oil-and-defining-jurisdictional-sustainability>
- Ada rencana untuk mengadakan pertemuan AC lagi di bulan April atau Juni untuk membahas versi akhir dari indikator dan model Trase.

Indikator keberlanjutan untuk kabupaten (Bernadinus Steni-INOBU)

- Sebelum presentasi, ada dokumen dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang telah dibagikan sebelum pertemuan: Terpercaya briefing 3 dan lampiran draft indikator.
- Dalam prosesnya, identifikasi indikator dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan, TPB, dan preferensi pemangku kepentingan berdasarkan praktek maupun aspirasi perubahan yang ingin dicapai. Ada 3 dimensi yang dibahas dalam pertemuan pertama dan kedua, yaitu dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam pertemuan kedua, ada proposal untuk memasukkan dimensi tata kelola.
- Deskripsi indikator mencakup dasar hukum, TPB terkait, metode penilaian, dan sumber data. Pada intinya, indikator dikembangkan berdasarkan undang-undang dan peraturan, komponen TPB, otoritas regional dan praktik terbaik yang diakui seperti FPIC/PADIATAPA, dan masalah akuntabilitas yang terkait dengan ketersediaan data serta otoritas dan tanggung jawab kabupaten / provinsi.
- Proposal awal memiliki 38 indikator. Selanjutnya, berdasarkan masukan dari pemerintah pusat (KLHK, Kemendagri dan Kementerian Pertanian) dan LSM (WRI, SPSK, IDH, LTKL) sehingga daftar tersebut dikurangi menjadi 19 indikator.
- Lihat daftar draf indikator di sini: <http://www.euredd.efi.int/documents/15552/460846/Terpercaya+Briefing+3+Annex+-+short+tables+final+text.pdf/7b8376f9-d799-9fd2-42d7-60b59e55c4d9>
- Dimensi sosial: FPIC/PADIATAPA tidak banyak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dimasukkan ke dalam standar karena mempertimbangkan praktek yang ada. Sementara pengakuan hak adat, resolusi konflik, alokasi untuk petani, serta pendaftaran petani sudah ada dalam peraturan saat ini. Dasar yang digunakan untuk mengukur belum melihat pemilahan secara tegas antara aspek kuantitatif atau kualitatif.
- Dimensi ekonomi: produktivitas petani, organisasi petani kecil, dukungan untuk petani, industri yang bertanggung jawab, dan pekerjaan pedesaan.



• Dimensi tata kelola: akses informasi publik, partisipasi multi pihak selama perencanaan, mekanisme pengaduan. Bagian ini adalah yang paling menantang mengenai ukuran verifikasi komponen dan dasar hukum untuk menentukan kinerja.



Diskusi dengan peserta

- Pengukuran basis (*baseline*) dan tren indikator, misalnya tutupan hutan dan perubahan tutupan hutan di kawasan konservasi dan perlindungan, adalah area yang perlu dibahas lebih lanjut. Saat ini, rencananya adalah untuk memperbarui indikator Terpercaya setiap tahun meskipun terdapat kesulitan mengakses informasi yang resmi dan diakui pada beberapa indikator, misalnya indikator tata kelola. Menurut masukan dari anggota Komite Penasihat, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung diskusi lebih dalam adalah tentang bagaimana perubahan tutupan hutan, perambahan, dan legalitas budidaya kelapa sawit, ditangani.
- Kementerian Pertanian, Direktorat Perkebunan (Ditjen Perkebunan) bersedia untuk melaksanakan satu putaran pertemuan tentang legalitas dan indikator yang relevan untuk ISPO; proses ini sebaiknya dapat diintegrasikan dengan baik.
- Ada ketertarikan dari perusahaan pembeli minyak kelapa sawit untuk dapat melihat kenapa ada kabupaten dengan kinerja kurang baik terutama terkait dengan perubahan tutupan hutan dan apakah kinerja tersebut dipengaruhi oleh kebijakan atau faktor alamiah misalnya El Nino, dll.
- Indikator tutupan hutan harus mempertimbangkan fakta bahwa beberapa kabupaten tidak memiliki banyak hutan yang tersisa dan karena itu tidak dapat melakukan deforestasi atau tingkat deforestasinya kecil. Terpercaya berencana untuk menggunakan informasi target penurunan emisi (FREL) tingkat provinsi/kabupaten, yang didasarkan pada pendekatan simpanan dan aliran emisi, untuk mengatasi masalah ini.
- Karena hutan dan FREL berada di bawah tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan karena hutan berada di bawah tanggung jawab provinsi dan bukan kabupaten, informasi tingkat provinsi akan digunakan untuk menunjukkan situasi mengenai hutan di kabupaten di seluruh provinsi meskipun memungkinkan untuk mengalokasikan indikator di tingkat kabupaten.
- FREL telah diterima oleh UNFCCC dan perhitungan emisi berdasarkan deforestasi dengan melihat perubahan tutupan hutan fisik daripada melihat perubahan status kawasan hutan negara menjadi kawasan non-hutan. Gambut juga termasuk.
- Indikator sumber daya manusia akan membantu menunjukkan apakah kabupaten memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola transisi menuju keberlanjutan.
- Indikator lingkungan yang mencakup polusi udara, tanah, dan air berdasarkan peraturan kota yang ada harus dimasukkan dalam Terpercaya. Saat ini, 5 laporan tahunan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga laporan triwulanan dari kantor lingkungan hidup (DLH) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Indikator Terpercaya harus memperhitungkan proporsi relatif petani dan perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit. Sebagai contoh, di Sumatra industri kelapa sawit milik rakyat tetapi di Kalimantan milik korporasi. Indikator Terpercaya termasuk satu yang mencakup bagian petani kecil (indikator 9) sehingga distribusi kepemilikan perkebunan kelapa sawit harus dipertimbangkan.



Indikator Terpercaya harus memperhitungkan persentase pengeluaran daerah untuk lingkungan dan tata kelola di tingkat lokal dan para pelaku yang terlibat sebagai ukuran untuk menunjukkan di mana keuntungan dibagikan dan kemungkinan dampak pada deforestasi.



- Indikator yang berkaitan dengan keuangan dan pajak harus dimasukkan dalam Terpercaya. Informasi terkait hal-hal berikut ini diperiksa oleh Kementerian Keuangan:
 - Pengeluaran pemerintah untuk lingkungan,
 - Pengumpulan pajak,
 - Distribusi pendapatan dari industri ekstraktif.
- Terpercaya harus mempertimbangkan tingkat kapasitas yang berbeda di setiap kabupaten
- Terpercaya harus mempertimbangkan inisiatif lain seperti FoKSBI dan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Minyak Sawit Berkelanjutan dan peta jalan di berbagai tingkat.
- Sehubungan dengan rancangan perundangan UE yang baru, terdapat indikator Terpercaya untuk petani kecil, dan produktivitas namun tidak melihat apakah petani tersebut berada pada lahan yang tidak digunakan secara langsung untuk biofuel / terdegradasi meskipun analisis spasial yang dilakukan oleh CIFOR (Atlas Kalimantan dan Papua) menunjukkan statusutupan hutan dan degradasi lahan pada saat itu, namun indikator terkait ini dapat dikembangkan.
- Rencana Aksi EU FLEGT adalah landasan konseptual untuk Terpercaya, yang dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sistem yang mendukung hasil yang serupa untuk minyak kelapa sawit. Delegasi UE mendanai dan mempertimbangkan pendanaan untuk beberapa pekerjaan lain:
 - Begitu Trase dan Terpercaya dikembangkan, mungkin ada sumber daya untuk melakukan penyaringan distrik-distrik termasuk diskusi dengan Malaysia tentang kesesuaian indikator. Peluncuran peraturan ISPO dan moratorium baru akan mengubah situasi hukum dan indikator Terpercaya dapat diperbarui untuk menyesuaikan. Ada juga kebutuhan untuk berkonsultasi dengan perusahaan untuk memastikan bahwa indikator Terpercaya memenuhi persyaratan mereka, dan dengan CSO di Indonesia, Malaysia, dan Eropa dan kemudian dengan China dan India.
 - Proyek VCA4D saat ini sedang menilai nilai-nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi dari minyak kelapa sawit pada berbagai tahap dalam rantai pasokan.
 - Studi lain yang didanai Delegasi Uni Eropa adalah menilai pembiayaan publik dan distribusi pendapatan pajak berdasarkanutupan hutan.
 - Sebuah studi tentang FREL Indonesia juga didukung mengingat pentingnya FREL, yang memiliki kepercayaan kuat melalui Perjanjian Paris dan sistem pemantauan khusus. Akan ada FREL baru setelah 2020 dan penggunaan FREL akan memungkinkan emisi diperhitungkan di Terpercaya sebagai tambahan indikator terkait legalitas hutan.
- Saat ini belum ada sinyal apakah kabupaten akan dinilai sebagai bagian dari sertifikasi ISPO yurisdiksi. Daftar indikator Terpercaya saat ini dapat digunakan sebagai daftar periksa untuk kabupaten dan dapat berkontribusi untuk pemantauan TPB dan ISPO. Platform keberlanjutan multi-pemangku kepentingan tingkat kabupaten yang didukung oleh pemerintah daerah akan dibutuhkan untuk mendukung penyusunan indikator dan membimbing transisi menuju keberlanjutan.
- Indikator kemitraan yang adil antara masyarakat dan bisnis harus dimasukkan dalam Terpercaya. SPKS perlu dikonsultasikan untuk saran ini.
- Indikator budidaya lahan kritis harus dimasukkan dalam Terpercaya
- Harus ada konsistensi penggunaan istilah seperti 'kriteria' dan 'indikator' dalam dokumentasi Terpercaya dan perlu diklarifikasi apakah indikator 'industri yang bertanggung jawab' hanya untuk petani kecil dan perusahaan.



- Terpercaya akan terus membahas persyaratan untuk berbagai tingkat indikator (Legalitas, Legalitas +, dan Keberlanjutan).



- Sekretariat LTKL saat ini membandingkan indikator dari proses keberlanjutan yang berbeda termasuk pendekatan yurisdiksi RSPO, Terpercaya, IDH melalui VSA, REDD +, CCBA yang merupakan alat untuk melihat peringkat lanskap berkelanjutan, platform sertifikasi ISEAL. Draft laporan telah diedarkan ke kabupaten-kabupaten dan pertanyaan-pertanyaan telah diterima terkait dengan hutan dan bagaimana hutan akan dipantau. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk mengklarifikasi apa yang akan dinilai dan mengapa: apakah ini tentang kepatuhan atau menunjukkan daya saing kabupaten? Insentif untuk kabupaten dapat mencakup: bantuan teknis, akses ke jaringan pengetahuan, akses pasar, pertemuan dengan kementerian, dan dukungan untuk pengakuan kabupaten, dll. Berdasarkan draft penilaian indikator berikutnya, LTKL akan menentukan informasi apa yang tersedia untuk mendukung pemantauan terkait dan akan melakukan pengujian indikator antara Juni dan November.
- Sehubungan dengan pengakuan hak adat (indikator 7). Hak komunal diakui oleh hukum dan pertanyaannya bukan tentang legalitas tetapi pengakuan. Sertifikat tanah adat saat ini tidak diakui sebagai bukti kepemilikan dan diperlukan peraturan pemerintah daerah untuk mengatur hal ini tetapi harus berhati-hati mengenai resiko komersialisasi tanah adat, keterlibatan perusahaan, dan politisasi masalah hak ulayat. Fokusnya harus pada perlindungan hak-hak adat secara keseluruhan dan tidak hanya pengakuan atas hak tanah.
- Perusahaan akan dengan senang hati membeli dari kabupaten berdasarkan indikator Terpercaya jika indikator tersebut sesuai dengan standar keberlanjutan, namun perusahaan tidak dapat membeli dari petani jika mereka memproduksi secara ilegal, mis. di kawasan lindung sehingga area produksi harus jelas dan indikator harus menunjukkan lokasi perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan negara (produksi komersial dan penjualan minyak sawit yang diproduksi di dalam kawasan hutan negara (termasuk hutan produksi serta hutan konservasi dan hutan lindung) adalah ilegal dan RSPO tidak memiliki toleransi untuk hal ini, terlepas dari apakah produsen adalah petani kecil atau tidak).
- Beberapa rekan perusahaan menyatakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan di COP21 dan bekerja dengan LSM di Indonesia. Bagaimana mereka ingin membeli dari kabupaten dan memberikan insentif akan tergantung pada yurisdiksi yang terlibat. Beberapa perusahaan besar tidak membeli secara langsung dari petani kecil tetapi dari kilang dan hal ini dapat menjadi bentuk dukungan terhadap petani kecil. Alternatif lain adalah dengan membangun kerjasama dengan pihak lain untuk membeli minyak sawit sumber dari yurisdiksi tertentu, belajar dari REDD + tentang pembagian manfaat.
- Masyarakat yang akan menilai (bukan kelompok tertentu) apakah indikator terkait hutan itu sesuai dan penerimaan terhadap indikator berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi dan transparansi, terutama berkenaan dengan data izin, mengingat banyak kabupaten menggunakan kekuasaan mereka untuk mengeluarkan izin.
- Kemungkinan akan ada kebutuhan untuk mengurangi jumlah indikator.
- Terpercaya dimulai ketika peraturan ISPO akan diluncurkan tetapi itu belum terjadi dan meskipun itu bukan niat awal dan secara umum pendekatan ISPO dan Terpercaya berbeda (sertifikasi tingkat petani + kelompok dibandingkan tingkat kabupaten), sertifikasi tingkat kebun akan memakan waktu bertahun-tahun namun pendekatan yurisdiksi bisa menjadi langkah antara.



Langkah selanjutnya

EFI



- Konsultasi dengan pemerintah kabupaten akan diadakan pada 26/02 bersama dengan LTKL
- Kompilasi data, terutama data yang dimiliki oleh pemerintah, untuk menguji indikator.
- Rapat komite berikutnya akan dilakukan pada bulan April atau Juni

Disiapkan oleh INOBU pada 20 Februari 2019.

No.	Nama	Institusi
1	Seth Van Doorn	EU
2	Thomas Sembres	EFI
3	Diah Suradiredja	KEHATI
4	Micka Bucki	EU
5	Sasmita Nugroho	KLHK
6	Manuel Zem	German Embassy
7	Arief Wijaya	WRI
8	Rauf Prasodjo	UNILEVER
9	Mardani	AMAN
10	Ludovic Maria	French Embassy
11	Nicoline Good	LTKL
12	Morten Van Dom	Danish Embassy
13	Wahyu Wijayanti	GAR
14	Arita Soenarjono	Dutch Embassy
15	Riandi H	LTKL
16	Kiki Taufik	Greenpeace
17	Mula Putera	Ditjenbun
18	Insan Syafaat	GAR
19	Apriadi	Bangda Kemendagri
20	Dwimus S.N	Ditjenbun
21	Herly Kurniawan	Ditjenbun
22	Timer Manurung	Auriga
23	Wiko S.	Auriga
24	Jewelina P	TNC
25	Gita S.	LTKL
26	Mansuetus Darto	SPKS
27	Ofra Shinta F	INOBU
28	Silvia Irawan	INOBU
29	Bernadinus Steni	INOBU
30	John Watts	INOBU

Foto



Foto 1. Foto Grup



Foto 2. Pembukaan dari Uni Eropa – Michael Bucki



Foto 3. Presentasi tentang indikator distrik – B Steni, INOBU



Foto 4. Feedback dari peserta